

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road atau *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan program infrastruktur yang diresmikan Tiongkok pada 2013. Program ini menghubungkan Asia Timur dan Eropa lewat infrastruktur fisik yang dibangun dengan kerja sama berbagai negara yang dilewati jalur ini. BRI disebut juga dengan *The New Silk Road* (Jalur Sutra Baru) karena jalur ini akan dibangun berdasar pada Jalur Sutra. Presiden Xi mengumumkan ada dua jalur yang akan dibangun, yaitu jalur sutra darat dan maritim.¹ Proyek pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan aliran perdagangan bebas, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan integrasi pasar yang mendalam dengan meningkatkan konektivitas benua Asia, Eropa, dan Afrika dari jalur darat dan maritim.² BRI memiliki lima prioritas implementasi kerja sama dalam dokumen "*Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*", yang mencakup koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, peningkatan integritas finansial, dan peningkatan "ikatan orang-ke-orang".³

Eropa adalah kawasan yang signifikan dalam BRI, sebab Jalur Sutra berujung di Eropa. Dalam perkembangannya, Eropa menjadi tujuan utama dari

¹ James McBride, "China's Massive Belt and Road Initiative," *Council on Foreign Relations*, terakhir diubah 21 Februari 2019, diakses 27 Juni, 2024, <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.

² Xinhua, "China Unveils Action Plan on Belt and Road Initiative," *The State Council The People's Republic of China*, terakhir diubah 2015, diakses 27 Juni 2024, https://english.www.gov.cn/news/top_news/2015/03/28/content_281475079055789.htm.

³ Eleanor Atkins et al., "Two Paths: Why States Join or Avoid China's Belt and Road Initiative," *Global Studies Quarterly* 3, no 3 (Juli 2023): 1-14.

foreign direct investment (FDI) Tiongkok. Eropa sendiri memandang FDI Tiongkok tidak termasuk dalam program BRI. Inggris, Jerman, dan Prancis sebagai tiga negara penerima FDI Tiongkok tertinggi pun tidak bekerja sama dalam BRI. Uni Eropa juga tidak memiliki pendekatan terpadu terhadap BRI hingga 2019.⁴ Namun dengan munculnya perdebatan dan mendekatnya BRI ke Eropa, negara-negara Eropa telah berinteraksi dengan BRI dalam caranya sendiri. Interaksi ini biasanya adalah kerja sama ekonomi atau proyek yang terkait dengan BRI, salah satunya adalah Italia.⁵

Italia dan Tiongkok memiliki hubungan diplomasi yang baik. Italia adalah negara Eropa dengan populasi etnis Tiongkok tertinggi, sebanyak 300.216 jiwa pada 2022.⁶ Tiongkok juga banyak menanamkan FDI di Italia. Italia yang masih terdampak *the Great Recession* mengharapkan bantuan dan investasi ini akan meningkat dengan kerja sama Italia dalam BRI.⁷ Italia juga dapat menjadi pusat perdagangan Tiongkok di Eropa dengan posisinya yang strategis.

MoU BRI yang ditandatangani Italia pada 2019 adalah bagian dari peringatan 50 tahun diresmikannya hubungan bilateral kedua negara ini, yaitu proyek "*Road to 50*".⁸ Hal ini memicu kekhawatiran dari negara Eropa lainnya, terutama terkait kemungkinan Tiongkok untuk mempengaruhi ekonomi domestik Italia, yang akan berdampak pada ekonomi Uni Eropa secara umum. Dengan kerja

⁴ Alice Politi, "Italy: A Case Study of the Silk Road Project in Europe," *Lau Policy Series* (2020).

⁵ Astrid Skala-Kuhmann., "European Responses to BRI," *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, no. 14 (2019): 144-157.

⁶ Statista, "Chinese Citizens in European Countries 2022," *Statista* (Statista Research Department, 13 Februari, 2024), terakhir diubah 13 Februari 2024, diakses 22 Juni 2024, <https://www.statista.com/statistics/1419107/eu-china-relations-chinese-citizens-living-europe/>.

⁷ Giulio Pugliese, Francesca Ghiretti, Aurelio Insisa, "Italy's Embrace of the Belt and Road Initiative: Populist Foreign Policy and Political Marketing," *International Affairs*, vol. 98, no. 3 (Mei 2022): 1038

⁸ Alessia Amighini, "Italy in The Belt and Road Initiative," *GeoProgress Journal* 6, no. 1 (2019): 53.

sama ini, Tiongkok memiliki keuntungan berupa akses geopolitik lewat pelabuhan yang ada di Italia. Kasus serupa telah terjadi dengan Pelabuhan Piraeus di Yunani yang telah dikuasai oleh Tiongkok dan menjadi pusat perdagangan utama Tiongkok di Eropa.⁹ Namun Italia mengakhiri kerja samanya dalam BRI pada Desember 2023 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.¹⁰

Terdapat respon pro dan kontra mengenai BRI. Beberapa negara menganggapnya serupa dengan *Marshall Plan* dengan konteks yang lebih negatif karena citra Tiongkok sebagai negara komunis dan sistem kerja sama ekonomi berisiko.¹¹ Sementara itu, negara lain melihatnya sebagai inisiasi kerja sama ekonomi regional yang menjanjikan dengan posisi Tiongkok sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia.¹²

Kebijakan Italia untuk menandatangani MoU BRI Tiongkok ini menimbulkan kontroversi akibat berbagai risiko yang ada. Secara umum risiko ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu risiko struktural, risiko ekonomi dan finansial, serta risiko geopolitik. Dari aspek struktural, Italia menghadapi risiko berupa kurangnya transparansi dari kerja sama, terutama di bidang finansial dan proses pengadaan proyek infrastruktur yang dilakukan.¹³

Dari aspek ekonomi dan finansial terdapat risiko dari akses pasar domestik

⁹ Alessia Amighini, "Italy in The Belt and Road Initiative," *GeoProgress Journal* 6, no. 1 (2019): 57.

¹⁰ Aurelio Insisa, "Timing Is Everything: Italy Withdraws from the Belt and Road Initiative," *IAI Commentaries* 67 (Desember 2023).

¹¹ Eleanor Atkins et al., "Two Paths: Why States Join or Avoid China's Belt and Road Initiative," *Global Studies Quarterly* 3, no 3 (Juli 2023): 1-14.

¹² "World Bank Open Data," *World Bank Open Data*, diakses 22 Juni, 2024, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true&skipRedirection=true&view=map.

¹³ Giulio Pugliese, Francesca Ghiretti, Aurelio Insisa, "Italy's Embrace of the Belt and Road Initiative: Populist Foreign Policy and Political Marketing," *International Affairs*, vol. 98, no. 3 (Mei 2022): 1033-1051

Italia oleh Tiongkok yang akan berdampak terhadap stabilitas perekonomian Italia secara umum. Selain itu, hal ini berarti bahwa pelaku ekonomi Italia kini harus bersaing dengan produk-produk Tiongkok yang murah.¹⁴ Apalagi dua negara ini memiliki struktur ekonomi yang sama-sama bergantung pada sektor manufaktur.¹⁵

Selain itu terdapat isu *debt trap* yang didukung oleh kasus pelabuhan Hambantota dimana Sri Lanka gagal membayar hutang BRI sehingga Sri Lanka akhirnya memberikan hak kuasa pelabuhan selama 99 tahun pada Tiongkok Desember 2017.¹⁶ Italia dan Sri Lanka tentu tidak dapat disamakan. Italia adalah negara maju, sedangkan Sri Lanka adalah negara berkembang. Namun Italia tergolong rentan akibat hutang publiknya yang besar. Italia adalah negara OECD dengan hutang terbanyak ketiga di dunia dalam hal persentase PDB dan per kapita.¹⁷ Mekanisme inisiasi kerja sama BRI Tiongkok yang terkesan ‘mengikutsertakan’ negara yang bekerja sama dalam satu program yang dipimpin oleh Tiongkok berisiko membuat negara tersebut mengalami ketergantungan ekonomi pada Tiongkok.¹⁸

Selanjutnya adalah aspek geopolitik yang terkait dengan isu keamanan dan kawasan. Amerika Serikat mengkritik keputusan Italia ini terkait dengan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan memiliki akses untuk mengintervensi dalam sektor vital Italia. Selain itu, perusahaan yang menjalin kerja sama BRI dengan pelabuhan di Italia adalah *China Communications Construction Company*

¹⁴ Alice Politi, “Italy: A Case Study of the Silk Road Project in Europe,” *Lau Policy Series* (2020).

¹⁵ Simone Dossi, “Italy-China relations and the Belt and Road Initiative. The need for a long term vision,” *Special Issue: Italy in the 21st Century's International Politics*, vol. 15, no. 1 (2020).

¹⁶ Alice Politi, “Italy: A Case Study of the Silk Road Project in Europe,” *Lau Policy Series* (2020).

¹⁷ OECD, “Government at a Glance 2019,” *OECD*, terakhir diubah 2019, diakses 27 Juni 2024, <https://web-archiver.oecd.org/2019-11-13/536611-gov-at-a-glance-2019-italy.pdf>

¹⁸ Alessia Amighini, “Italy in The Belt and Road Initiative,” *GeoProgress Journal* 6, no. 1 (2019): 59.

(CCCC) dan perusahaan ini memiliki keterlibatan dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat mengkritik kondisi ini dan menyatakan bahwa perusahaan ini tidak cocok menjadi rekan kerja sama.¹⁹ Uni Eropa juga mengemukakan kekhawatiran terkait kebijakan Italia yang kontras dengan posisi Uni Eropa terhadap BRI Tiongkok sehingga Italia mengambil risiko untuk terisolasi dari Uni Eropa. Hal ini terbukti dari Italia yang terpinggirkan dalam proses penyusunan *Comprehensive Agreement on Investment (CAI)* dengan Tiongkok. Hal ini terbukti dari dua hal, yang pertama adalah abstainnya Italia dalam *voting* terkait CAI ini. Kejadian kedua adalah munculnya suara Italia mengenai representasi yang berinteraksi dengan Xi Jinping harus berasal dari representasi institusional. Suara ini kemudian diabaikan oleh Prancis dan Jerman.²⁰

Penandatanganan MoU BRI oleh Italia merupakan kebijakan yang kontroversial. Tindakan Italia secara publik menyatakan kerja samanya dalam BRI menuai perdebatan berbagai kalangan. Hal ini disebabkan oleh risiko yang dihadapi oleh Italia dalam keputusan ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan luar negeri Italia yang bekerja sama dalam program pembangunan BRI Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2023.

¹⁹ Giulio Pugliese, Francesca Ghiretti, Aurelio Insisa, "Italy's Embrace of the Belt and Road Initiative: Populist Foreign Policy and Political Marketing," *International Affairs*, vol. 98, no. 3 (Mei 2022): 1033-1051

²⁰ Alice Politi, "Italy: A Case Study of the Silk Road Project in Europe," *Lau Policy Series* (2020).

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang di atas telah menyinggung bahwa keputusan Italia menimbulkan perdebatan terhadap penandatanganan MoU BRI yang dilakukan. Berbagai risiko muncul dari keputusan Italia menandatangani MoU BRI Tiongkok, yaitu risiko struktural, ekonomi dan finansial, serta geopolitik. Di sisi lain, tiga negara penerima FDI Tiongkok tertinggi sendiri tidak bekerja sama dalam BRI. Di tengah semua risiko dan pilihan untuk bekerja sama tanpa menandatangani MoU BRI seperti negara-negara Eropa lainnya, Italia tetap menandatangani MoU BRI pada Maret 2019.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah “Mengapa Italia bekerja sama dalam program BRI Tiongkok tahun 2019-2023?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Italia bekerja sama dalam program BRI Tiongkok tahun 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi literatur dalam pengembangan studi hubungan internasional dan dapat memberikan kontribusi terkait analisis kebijakan Italia bekerja sama dalam BRI Tiongkok tahun 2019-2023.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku

kepentingan sebagai penggambaran analitis dalam analisis kebijakan luar negeri terhadap kebijakan Italia bekerja sama dalam program BRI Tiongkok tahun 2019-2023.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa referensi melalui tinjauan pustaka terhadap beberapa artikel jurnal yang dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi guna menjawab pertanyaan penelitian. Referensi pertama yang peneliti gunakan adalah artikel jurnal dengan judul “*Two Paths: Why States Join or Avoid China’s Belt and Road Initiative*” yang ditulis oleh Eleanor Atkins et al. pada tahun 2023.²¹ Artikel jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme bekerja samanya suatu negara dalam program BRI Tiongkok dan alasan mengapa suatu negara lebih memilih untuk bekerja sama atau justru menolak untuk bekerja sama. Dalam tulisan ini dijelaskan secara umum mengenai program BRI Tiongkok yang diluncurkan pada tahun 2013. Tiongkok menjalankan program ini dengan bekerja sama secara bilateral dengan berbagai negara yang berada di Jalur Sutra dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU dalam program BRI ini bersifat *low-cost* yang bertujuan untuk menarik negara-negara yang belum bekerja sama menjadi tertarik untuk bekerja sama.

Tulisan ini menggunakan MoU BRI sebagai acuan pengukuran kerja sama negara atas 3 alasan; 1) pemerintah Tiongkok sendiri mendukung penggunaan MoU, 2) Penandatanganan MoU menunjukkan keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama, dan 3) MoU menunjukkan kepentingan politik kedua belah pihak untuk bekerja sama, namun tidak berisi mekanisme dari kerja sama itu sendiri. Hal

²¹ Eleanor Atkins et al., “Two Paths: Why States Join or Avoid China’s Belt and Road Initiative,” *Global Studies Quarterly*, vol. 3, no. 3 (Juli 2023).

ini juga sesuai dengan karakteristik MoU BRI yang susunannya berfokus pada prinsip dari kerja sama yang dilakukan, bukan pada tindakan atau proyek yang dijalankan secara spesifik.

Artikel ini berargumen bahwa determinan suatu negara untuk bekerja sama lebih kuat daripada determinan untuk menolak, sebab dengan penggunaan MoU serta upaya Tiongkok menarik berbagai negara untuk ikut bekerja sama, perjanjian kerja sama BRI Tiongkok menjadi perjanjian yang *low-cost* namun memiliki potensi manfaat yang tinggi. Durasi kerja sama tidak terlalu lama dan MoU juga mengandung pasal mekanisme penghentian kerja sama, sedangkan investasi yang ditawarkan dalam program ini sangatlah besar. Apabila suatu negara menolak bekerja sama dalam BRI, artinya terdapat situasi yang menyebabkan negara tersebut memandang *cost* kerja sama BRI lebih besar dibandingkan manfaatnya, kendati kemudahan proses kerja sama dan manfaat yang ditawarkan. Terdapat dua situasi yang memungkinkan munculnya pandangan ini, yaitu perbedaan norma dan nilai dengan Tiongkok, dan kedekatan hubungan dengan Amerika Serikat. Namun dari hipotesis ini, terdapat satu negara yang berbeda, yaitu Italia.

Italia adalah negara demokrasi maju yang bekerja sama dalam BRI pada Maret 2019. Seorang politikus senior Italia menyebutkan dalam wawancara dengan penulis artikel jurnal ini bahwa pemerintahan Italia saat itu memutuskan untuk bekerja sama dalam BRI Tiongkok sebagai tindakan '*marketing politik*' yang menysar basis *Eurosceptic* di Italia yang disaat bersamaan juga menawarkan keuntungan ekonomi dari kerja sama dengan Tiongkok. Argumen yang terkait dengan politik domestik ini juga didukung oleh artikel "*Italy-China*

Relations and the Belt and Road Initiative. The Need For a Long Term Vision” oleh Simone Dossi.²² Artikel ini menyebutkan bahwa Tiongkok tertarik untuk bekerja sama dengan Italia disebabkan oleh posisi geopolitik Italia yang strategis, yang membuka akses Tiongkok kepada kawasan Eropa dan Laut Mediterania serta Uni Eropa. Dengan bekerja sama dengan Italia, Tiongkok dapat memiliki akses terhadap kebijakan Uni Eropa yang lebih luas. Laut Mediterania sendiri merupakan titik penghubung akses terhadap Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Sedangkan bagi Italia, Tiongkok adalah sumber investasi sekaligus kompetitor di bidang manufaktur. Hubungan Italia dengan Tiongkok telah berjalan jauh sebelum penandatanganan MoU BRI pada Maret 2019, namun dalam sektor perdagangan dengan Tiongkok, Italia mengalami defisit. Maka diharapkan bahwa dengan penandatanganan MoU BRI ini, Italia mampu menyeimbangkan, bahkan mendapat surplus, dari hubungan perdagangan dengan Tiongkok dan juga meningkatkan angka investasi.

Tulisan ini juga membahas awal mula Italia berinteraksi dengan program BRI. Ketertarikan Italia untuk menandatangani MoU BRI dimulai pada masa Pemerintahan Conte I pada Juni 2018. Sejak Conte menjabat sebagai Perdana Menteri Italia, intensitas interaksi antara Italia dengan Tiongkok meningkat drastis. Kedekatan pemangku jabatan di Pemerintahan Conte I dalam artikel jurnal ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Italia menandatangani MoU BRI Tiongkok. Faktor lainnya adalah pandangan partai-partai yang mengisi koalisi Pemerintahan Conte I yang memandang bahwa penandatanganan MoU BRI adalah simbol dari keberanian Italia untuk mengambil kebijakan luar negeri

²² Simone Dossi, “Italy-China relations and the Belt and Road Initiative. The need for a long term vision,” *Special Issue: Italy in the 21st Century's International Politics*, vol. 15, no. 1 (2020).

yang murni mengutamakan kepentingan negaranya dan tidak dipengaruhi atau terikat atas relasi dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tindakan ini dipandang sebagai bukti bahwa Italia adalah negara yang berdiri sendiri dan mengutamakan rakyatnya di atas hubungan-hubungan dengan negara lain.

Dalam tulisan “*Italy’s Embrace of the Belt and Road Initiative: Populist Foreign Policy and Political Marketing*” oleh Giulio Pugliese, Francesca Ghiretti, dan Aurelio Insisa, faktor politik domestik Italia dalam proses penandatanganan MoU BRI juga dibahas.²³ Dalam tulisan ini disebutkan bahwa pemerintahan Italia pada masa Pemerintahan Conte I adalah pemerintahan yang populis. Dari faktor internasional, penandatanganan MoU oleh Italia adalah strategi *soft balancing* dengan Jerman, Belgia, dan Prancis. Dua partai yang berkoalisi dalam Pemerintahan Conte I, yaitu M5S dan Lega, bersatu di bawah rasa ketidakpuasan terhadap situasi politik dan sosio-ekonomi Italia. Kedua partai ini juga mengklaim bahwa mereka adalah representasi dari masyarakat yang melawan pihak berkuasa. Ketidakpuasan ini juga ditujukan pada Uni Eropa dan politikus Italia yang dianggap hanya menjadi pendukung atau penerima pasif dari kebijakan yang disusun di tempat lain, dalam artian Italia tidak dipimpin murni atas kepentingan rakyat Italia. Hal ini menyebabkan Pemerintahan Conte I mendorong pandangan *euroscpticism*. Italia ingin menghindari hambatan-hambatan kerja sama yang disebabkan oleh Uni Eropa dan menjalin kerja sama dengan aktor eksternal yang signifikan, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Conte I tidak tampak terisolasi dari dunia internasional. Penandatanganan MoU juga dapat dikemas sebagai kesuksesan dari Pemerintah

²³ Giulio Pugliese, Francesca Ghiretti, Aurelio Insisa, “Italy’s Embrace of the Belt and Road Initiative: Populist Foreign Policy and Political Marketing,” *International Affairs*, vol. 98, no. 3 (Mei 2022): 1033-1051.

Conte I untuk mendapatkan salah satu negara besar sebagai rekan kerja sama.

Artikel “*Continuity and Change in Italy-China Relation: From Economic Pragmatism to Selective Followership and Back*” oleh Giovanni B. Andornino mengkaji lebih dalam situasi politik domestik Italia dan posisi Italia dalam proses kerja sama dengan Tiongkok.²⁴ Terdapat tiga faktor domestik yang mendorong Italia bekerja sama dalam BRI Tiongkok, yaitu *political expediency*, *political personnel*, dan *political timing*. Semuanya dijelaskan mulai dari proses pemilu Italia yang menghasilkan koalisi antara Partai Lega dengan Partai M5S. Dalam pemilu, kedua partai ini melabeli diri sebagai ‘*agent of change*’ yang akan membawa perubahan pada Italia dari situasi politiknya kini. Kedua partai ini pun sering mengkritik Uni Eropa dan pejabat Italia yang sedang menjabat. Dengan munculnya Tiongkok sebagai rekan kerja sama, kedua partai ini berhasil membuktikan diri sebagai ‘*agent of change*’ yang bekerja sama dengan aktor *non-mainstream* dalam konteks afiliasi Italia dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara kawasan Transatlantik. Kerja sama dengan Tiongkok juga menjadi bukti instan bahwa pemerintahan saat ini adalah ‘*government of change*’. Perubahan arah kebijakan luar negeri Italia dibandingkan negara-negara lain di Eropa menjadikan Italia memiliki potensi untuk menjadi *trend-setter* dan *norm-maker*.

Untuk Uni Eropa sendiri, artikel dengan judul “*Italy’s Embrace of BRI and The Role of Internal Political Dynamics*” oleh Alessia Amighini membahas mengenai bagaimana implikasi dari perjanjian kerja sama BRI Tiongkok terhadap

²⁴ Giovanni B. Andornino, “Continuity and Change in Italy-China Relation: From Economic Pragmatism to Selective Followership and Back,” *China-US Competition* (Januari 2023): 133-157.

Uni Eropa.²⁵ Italia yang berubah arah dari yang awalnya skeptis terhadap ekspansi ekonomi Tiongkok menjadi bersikap lebih terbuka, bahkan memberikan legitimasi terhadap program ini adalah sikap yang berlawanan dengan sikap yang diambil oleh Uni Eropa. Sebelum Italia mengambil keputusan, Uni Eropa belum memiliki *framework* yang jelas dalam menyikapi ekspansi ekonomi Tiongkok ke arah Eropa dalam program pembangunannya yang pasti melibatkan Eropa yang berada di ujung Jalur Sutra, jalur dasar program BRI. Dengan bekerja samanya Italia dalam program BRI, Uni Eropa terdorong untuk mendiskusikan strategi umum dalam menghadapi Tiongkok dalam persiapannya untuk EU-China *Summit* yang akan diadakan pada April 2019, sebulan setelah penandatanganan MoU BRI oleh Italia.



²⁵ Alessia Amighini, "Italy's Embrace of BRI and The Role of Internal Political Dynamics," *The European Union and China's Belt and Road*, (2021): 16.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*)

Sistem internasional terdiri atas negara-negara berdaulat yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat dilakukan melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri sendiri dapat didefinisikan sebagai aktivitas suatu negara yang memenuhi tujuan dan kepentingan negara tersebut dalam arena internasional. Vladimir Benko mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah proses dan sebuah sistem aktivitas yang dilakukan oleh komunitas masyarakat yang diatur oleh negara dalam arena internasional. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi arena internasional yang sejalan dengan tujuan dan objektif dari aktivitas politik yang semuanya ditujukan untuk kepentingan negara tersebut. Sedangkan Peter Calvert memandang kebijakan luar negeri sebagai keputusan dan aktivitas yang terkait dengan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Definisi menurut Calvert lebih menitik berat kepada hubungan antar-negara, sedangkan Benko lebih berfokus pada tujuan yaitu kepentingan nasional suatu negara.²⁶ Namun hal yang serupa antara kedua definisi ini adalah bahwa kebijakan luar negeri akan mempengaruhi sistem internasional.

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri, peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebijakan luar negeri yang akan dianalisis sehingga kebijakan tersebut dapat diolah dan dijelaskan lebih lanjut. Hal ini sering luput oleh peneliti yang terlalu fokus kepada proses pengambilan keputusan dibandingkan kebijakan itu sendiri. Terkait hal ini, J. F. Morin dan J. Paquin dalam bukunya *Foreign*

²⁶ Ernest Petric, *Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice*, (Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 1-5.

Policy Analysis (2018) memberikan 5 tolok ukur dasar dalam mengidentifikasi suatu kebijakan luar negeri.

1.7.1.1 Tujuan Kebijakan Luar Negeri

Beberapa ahli hubungan internasional mengasumsikan bahwa kebijakan luar negeri memiliki beberapa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dianggap tidak memiliki batas waktu, universal dan valid untuk setiap negara dalam situasi apapun. Tergantung pada teori yang dipilih oleh peneliti, tujuan ini bisa jadi adalah stabilitas sistem internasional, akumulasi kekayaan, meningkatkan kekuatan relatif, upaya menjaga kekuasaan oleh pemimpin negara tersebut, atau perubahan identitas nasional. Asumsi bahwa negara memiliki satu tujuan yang telah ditetapkan sesuai teori yang ada memang memberikan kemudahan dalam metode penelitian. Namun hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan di mana kepala negara mengejar tujuan yang berbeda-beda yang terkadang kontradiktif satu sama lain. Hal ini berarti bahwa tidak ada teori analisis kebijakan luar negeri yang valid terhadap semua area isu dan fenomena.

Terdapat dua cara untuk memetakan tujuan suatu kebijakan secara spesifik. Yang pertama yaitu dengan meyakini bahwa tujuan yang dijabarkan oleh kepala negara adalah benar tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut. Sedangkan kemungkinan kedua adalah dengan mendeduksi tujuan sebenarnya dari kebijakan luar negeri tersebut dengan menganalisis tindakan kepala negara tersebut.

Menyimpulkan tujuan dari kebijakan luar negeri yang diambil dengan melihat tindakan negara alih-alih mengandalkan tujuan yang dipublikasikan secara sengaja dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan

menganalisis hasil dari kebijakan tersebut. Apabila kebijakan dilaksanakan dalam periode waktu yang lama dan terdapat banyak kesempatan untuk memodifikasi kebijakan tersebut, maka hasil dari kebijakan tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Cara lainnya adalah dengan menyimpulkan tujuan kebijakan luar negeri dengan menganalisis variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Contohnya adalah kebijakan bantuan luar negeri, di mana pertimbangan yang lebih utama biasanya justru adalah pertimbangan politik dibandingkan kondisi perekonomian dari suatu negara.

1.7.1.2 Sumber Daya yang Digunakan

Raymond Aron memandang kekuatan sebagai implementasi sumber daya tertentu dalam situasi tertentu.²⁷ Kekuatan tidak menekankan kepemilikan sumber daya, namun penggunaan sumber daya dalam situasi tertentu. Sumber daya dan konteks merupakan aspek esensial dari kekuatan, namun hal tersebut saja tidak cukup.

Sumber daya yang dimaksud dalam konteks kebijakan luar negeri mencakup banyak sumber daya, seperti sumber daya yang dapat digunakan namun tidak bertambah dengan sendirinya seperti wilayah, populasi, dan bahan baku, hingga sumber daya abstrak seperti prestise dan patriotisme. Sumber daya merupakan hal yang spesifik terhadap bidang tertentu, tidak ada sumber daya yang cocok untuk semua bidang secara umum.

Dalam implementasi hubungan antara sumber daya dengan pengaruh suatu negara, terdapat suatu “*power paradox*” di mana terdapat kesenjangan antara sumber daya yang dimiliki dengan pengaruh negara tersebut dalam sistem

²⁷ Jean-Frédéric Morin, Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Springer Nature, 2018), 27.

internasional. Contohnya adalah Amerika Serikat pasca Perang Dunia I yang sudah memiliki sumber daya ekonomi untuk mengatur sistem ekonomi internasional sesuai kepentingannya namun malah lebih memilih kebijakan luar negeri yang isolasionis hingga Presiden Roosevelt menggunakan sumber daya ekonomi Amerika Serikat untuk meningkatkan pengaruhnya dalam sistem internasional pasca jatuhnya pasar saham 1929. Hal inilah yang menyebabkan Robert Keohane dan Joseph Nye mendefinisikan hegemoni ekonomi tidak hanya dari sumber daya ekonomi yang cukup untuk menjaga tatanan ekonomi internasional, namun juga niat dan kemauan untuk menggunakan sumber daya itu untuk tujuan tersebut.²⁸

Dalam proses perubahan sumber daya hingga menjadi kebijakan luar negeri sendiri terdapat dua bagian, yaitu mobilisasi dan eksploitasi. Negara membutuhkan strategi mobilisasi dan juga strategi eksploitasi. Kedua strategi ini disusun oleh negara secara simultan. Mobilisasi adalah transformasi dari sumber daya yang ada menjadi kemampuan atau kapabilitas dari suatu negara. Sedangkan eksploitasi adalah transformasi kapabilitas tersebut menjadi instrumen kebijakan luar negeri. Proses-proses ini dijalankan oleh para pemangku kepentingan yang beroperasi dalam kerangka kerja institusional dan sosial yang spesifik.

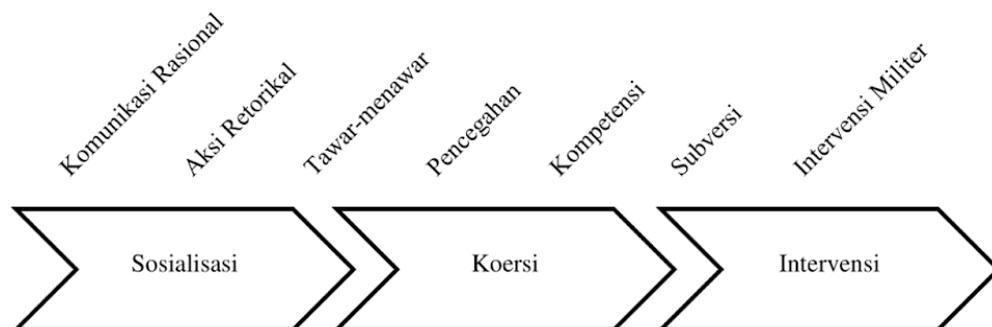
Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi penggunaan sumber daya dalam konteks penyusunan kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah kemungkinan kontradiksi antara mobilisasi dan eksploitasi. Kebijakan yang meningkatkan mobilisasi suatu sumber daya bisa saja mengurangi kapabilitas negara tersebut.

²⁸ Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, *Power and Interdependence* (1974), 44, dikutip dalam Jean-Frédéric Morin, Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Springer Nature, 2018), 29.

Variabel selanjutnya adalah pilihan antara kontrol, otonomi, dan legitimasi. Dalam menyusun kebijakan luar negeri, suatu negara bisa memprioritaskan salah satu antara tiga pilihan itu atas dasar struktur sosial dan sistem politik yang ada. Contohnya adalah kebijakan untuk mematuhi rekomendasi dari organisasi internasional akan meningkatkan legitimasi negara tersebut, namun mengurangi otonomi politik negara tersebut.

1.7.1.3 Instrumen Kebijakan Luar Negeri

Instrumen biasanya digunakan dalam mengkaji variasi kebijakan luar negeri dalam suatu rentang waktu, domain, atau kawasan. Hingga kadar tertentu, penekanan terhadap instrumen menggambarkan proses pengambilan keputusan yang terjadi.



Gambar 1.1 Instrumen kebijakan luar negeri

Sumber: Morin dan Paquin, "Foreign Policy Analysis: A Toolbox"

Sesuai gambar di atas, instrumen dalam kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga yaitu sosialisasi, koersi, dan intervensi.

a. Sosialisasi

Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai transfer keyakinan, nilai, dan ide dari satu aktor ke aktor lainnya.²⁹ Ide dapat disebar dalam berbagai cara.

²⁹ Jean-Frédéric Morin, Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Springer Nature, 2018), 32.

Dalam *rational communication*, aktor bisa menjadi sangat terpengaruh oleh validitas argumen aktor lainnya hingga aktor ini menyesuaikan ide mereka sendiri. Namun banyak aktor yang berkomunikasi secara strategis. *Rhetorical action* adalah komunikasi dengan mengekspresikan argumennya demi mencapai suatu tujuan. Aktor yang menggunakan *rhetorical action* akan mendramatisir suatu kejadian, menciptakan hubungan dari ide-ide yang sebelumnya tidak berhubungan, dan menciptakan ekspresi yang menggugah untuk digunakan dalam diskusi demi mengarahkan diskusi tersebut ke arah tertentu. Contoh nyata dari hal ini adalah ‘*War on Terror*’ yang digaungkan Presiden Bush pasca 11 September 2001.

b. Koersi

Tindakan koersif dirancang untuk mempengaruhi suatu negara untuk bertindak dengan mengubah cara memperhitungkan kepentingannya tanpa mengintervensi secara langsung wilayah negara tersebut. Istilah ini mencakup berbagai instrumen yang berasal dari proses berbeda dan mempunyai dampak berbeda. Instrumen-instrumen ini dapat disusun menjadi setidaknya enam kategori.

1) *Carrot and stick*

Kategori pertama adalah idiom “*carrot and stick*” yang membedakan instrumen koersif yang menggunakan strategi reward-based dan instrumen yang menggunakan sanksi negatif untuk mendorong tindakan tertentu.

2) *Actual Imposition*

Kategori kedua adalah perbedaan dari sanksi yang benar-benar diterapkan atau tidak. Contohnya adalah mobilisasi militer pada malam pertama di Perang

Dunia I yang merupakan demonstrasi kekuatan untuk mengintimidasi lawan. Hal ini berbeda dibandingkan keputusan Swiss untuk membekukan aset-aset kepala negara tertentu yang ada di Bank Swiss, yang dilakukan tanpa peringatan sebelumnya.

3) *Goals*

Kategori ketiga adalah berdasarkan tujuan. *Dissuasion* adalah bentuk koersi yang bertujuan untuk menjaga status *quo*, sedangkan *compellence* adalah bentuk koersi yang bertujuan untuk mengubah status *quo*.

4) *Targeted vs General Scope*

Kategori keempat adalah sasaran dari instrumen koersi. Instrumen koersi yang memiliki sasaran tertentu biasanya digunakan dalam situasi krisis dan memiliki logika pengambilan keputusan yang berbeda dengan sasaran umum, sedangkan instrumen koersi yang ditujukan secara umum biasanya dilakukan dengan proses institusionalisasi. Contohnya adalah keputusan Amerika Serikat untuk menolak mendukung permintaan pinjaman dana IMF oleh Inggris selama isu Kanal Suez belum selesai tidak akan dapat dijelaskan dengan logika yang sama dengan keputusan kongres untuk menetapkan undang-undang di mana negara yang mendukung terorisme tidak akan mendapatkan bantuan dari dana Amerika Serikat di IMF.

5) *Targeted elite*

Tindakan koersif selanjutnya membedakan sasaran sanksi yang hanya menyasar elit di suatu negara dari populasi keseluruhan negara tersebut. Contohnya adalah kebijakan Amerika Serikat untuk melarang warga negara Amerika Serikat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan petroleum

Belneftekhim secara khusus menysasar lingkaran pertemanan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Hal ini berbeda dengan kebijakan negara-negara Arab yang mengurangi kuota ekspor minyak terhadap Amerika Serikat akibat dukungan militer dari Amerika Serikat terhadap Israel pada 1973. Kebijakan ini menysasar hingga ke warga Amerika Serikat secara keseluruhan.

Tipe lain dari tindakan koersif yang berbeda dari pembagian di atas adalah diplomasi koersif. Menurut Alexander George, diplomasi koersif adalah tindakan koersif yang “memberikan kesempatan pada lawan untuk berhenti atau mundur sebelum menggunakan paksaan kepada lawan”. Intervensi militer biasanya adalah hasil dari diplomasi koersif yang gagal.

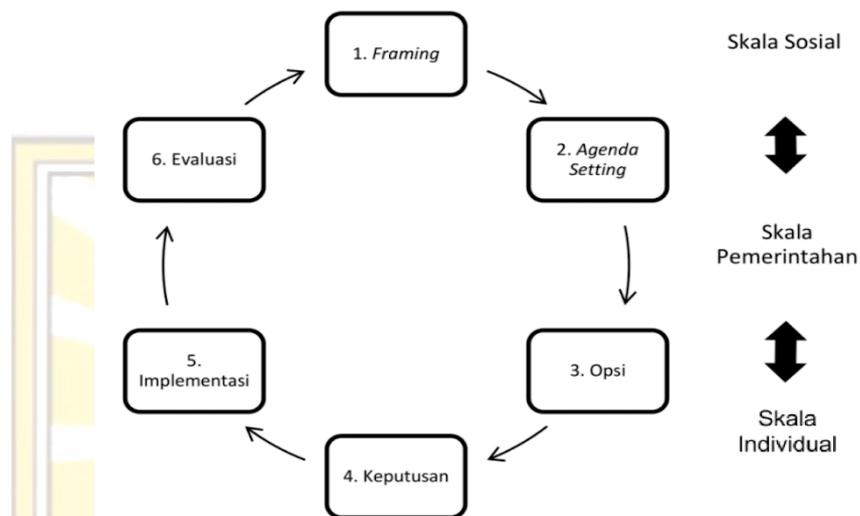
c. Intervensi

Intervensi adalah segala serangan yang dilakukan terhadap aspek domestik dari negara lain untuk mengubah struktur internal dari negara tersebut. Penting untuk membedakan intervensi politik dengan intervensi militer. Intervensi politik bertujuan untuk kudeta diam-diam dengan cara mendukung kelompok pemberontak atau mengembalikan stabilitas dengan mendukung pemerintahan yang lemah. Di sisi lain, intervensi militer tidak berarti perang. Sebagian besar dari intervensi militer justru tidak berakhir pada perang. Banyak intervensi militer yang digunakan untuk mengetes kegigihan suatu negara, atau untuk menekan negosiasi sambil menghindari konfrontasi langsung, atau sekadar mengintimidasi.

1.7.1.4 Proses Kebijakan Luar Negeri

Dengan membagi proses pengambilan keputusan menjadi beberapa segmen, level analisis yang berbeda-beda dapat teridentifikasi. Namun untuk analisis kebijakan luar negeri, segmentasi yang dilakukan harus diadaptasikan,

karena dalam kajian kebijakan luar negeri biasanya posisi eksekutif tertinggi akan ditentang, sedangkan posisi legislatif jarang terlibat secara langsung, dan kelompok kepentingan tidak terlalu aktif dan perdebatan yang ada juga tidak transparan.



Gambar 1.2 Siklus penyusunan kebijakan luar negeri.

Sumber: Morin dan Paquin, "Foreign Policy Analysis: A Toolbox"

Dari bagan di atas, tahapan pertama adalah *Framing*. Banyak kebijakan luar negeri yang tidak jelas karena tidak disusun sebagai masalah. Untuk suatu masalah agar disusun sebagai sebuah isu politik, masalah tersebut harus diberi sebuah *framework*, dalam artian lain memberi nama, menginterpretasikan dan menyederhanakan masalah tersebut.

Tahap kedua adalah *Agenda-setting*. Disini peran dari aktor non-negara sangat penting dalam meyakinkan pejabat-pejabat kunci yang mengontrol akses terhadap para pengambil keputusan bahwa isu yang muncul adalah esensial dan harus dimasukkan dalam daftar prioritas politik.

Tahapan ketiga adalah Opsi. *Framework* yang telah disediakan akan

menentukan pejabat sektor apa saja yang akan mengkaji opsi kebijakan yang ada. Tahapan keempat adalah Pengambilan Kebijakan di mana pembuat kebijakan akan dipanggil untuk memberikan pendapat mengenai pilihan kebijakan yang ada. Setelah kebijakan diputuskan, maka tahapan selanjutnya adalah Implementasi di mana administrasi publik akan bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan serta mengadaptasikan kebijakan tersebut. Namun administrasi ini tentu memiliki keterbatasan dalam melakukan tugasnya, sehingga dibutuhkan tahapan terakhir yaitu Evaluasi di mana kebijakan ini bisa dikaji kembali atau berlanjut sesuai situasi yang ada.

1.7.1.5 Hasil Kebijakan Luar Negeri

Dalam menentukan kesuksesan suatu kebijakan luar negeri, dibutuhkan suatu kesepakatan tentang situasi indikator kesuksesan dari suatu kebijakan. Dalam mengukur efektivitas dari suatu kebijakan, terdapat beberapa tantangan metodologikal. Kesulitan ini kemudian mendorong kajian mengenai hasil kebijakan luar negeri ke arah sanksi ekonomi. Terdapat 3 keuntungan yang didapat dengan menjadikan sanksi ekonomi sebagai alat untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan. Yang pertama adalah jumlah kasus sanksi ekonomi yang banyak membuat analisis statistik terkait hal ini menjadi lebih akurat. Yang kedua, sanksi ekonomi biasanya diberlakukan dengan alasan yang spesifik sehingga sanksi ekonomi memiliki tolok ukur penilaian yang jelas. Yang ketiga adalah pelaksanaannya yang cenderung jelas dan transparan sehingga peneliti dapat menentukan waktu dan tempat sanksi ekonomi dengan jelas serta menghitung skala sanksi dengan jelas. Efektivitas dari sanksi ekonomi dapat ditentukan dengan jelas lewat kerugian negara dalam persentase GDP.

Cara lain dalam menentukan efektivitas kebijakan luar negeri adalah melalui *feedback*. *Feedback* atau umpan balik dapat didefinisikan sebagai pesan tentang tindakan suatu aktor yang dikirimkan kembali oleh sistem kepada aktor tersebut, atau sebuah pesan yang dikirimkan oleh aktor tentang keadaan sistem pada sistem tersebut. Terdapat dua jenis umpan balik, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Melalui *Historical Institutionalism*, umpan balik dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan luar negeri. Teori ini menggunakan *path of dependence*, yaitu situasi di mana keputusan di masa lalu memberikan dampak di masa sekarang. Apabila aktor mengambil keputusan tertentu, maka sulit untuk mengubah jalur atau membatalkan keputusan yang telah diambil.

Lima indikator dari konsep analisis kebijakan luar negeri oleh Morin dan Paquin di atas memiliki keterkaitan dengan isu yang diangkat, dimana konsep ini akan memetakan kebijakan luar negeri Italia yang kemudian akan menjelaskan situasi serta alasan yang membuat Italia mengambil keputusan untuk bekerja sama dalam BRI Tiongkok. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dijelaskan mengapa Italia bekerja sama dalam program BRI Tiongkok menggunakan konsep ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* dan *logos* yang masing-masing berarti metode dan pola pikir, cara pandang, struktur pengetahuan, nalar, dan kata. Dari padanan kata ini dapat disimpulkan bahwa metodologi bersifat lebih luas dibandingkan metode, di mana metode mengacu pada alat penelitian yang spesifik sedangkan metodologi mengacu pada hirauan

epistemologis dan asumsi-asumsi filosofis.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada proses pengumpulan data dan strategi dan teknik analisis data yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita, dan karena itu mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional.³¹

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif sendiri didefinisikan sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik suatu fenomena.³² Jenis penelitian ini dapat menjelaskan kebijakan Italia bekerja sama dengan BRI Tiongkok tahun 2019-2023.

1.8.2 Batasan Penelitian

Objek penelitian adalah kebijakan Italia dalam bekerja sama dalam BRI Tiongkok. Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang menyebabkan Italia bekerja sama dalam BRI. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Batasan waktu tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan penandatanganan MoU BRI oleh Italia pada Maret 2019 hingga keluarnya Italia dari BRI secara resmi pada Desember 2023.³³

³⁰ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2016), 2.

³¹ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2016), 64.

³² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (SAGE, 2014).

³³ Alessandra Migliaccio dan Flavia Rotondi, "Italy Tells China It Will Exit Belt and Road Investment Pact," *Bloomberg*, 6 Desember 2023, diakses 3 Juli 2024, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-06/italy-notified-china-it-will-exit-belt-and-road-pact-radiocor?sref=VZPf2pAM>.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek yang dalam suatu penelitian yang perilakunya akan dideskripsikan, jelaskan, dan diprediksi atau diperkirakan.³⁴ Unit analisis dalam penelitian ini adalah Italia. Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang memiliki dampak terhadap unit analisis yang akan diteliti. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah BRI Tiongkok.

John Spanier mengategorikan tingkat analisis dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat sistemik, tingkat negara-bangsa, dan tingkat individu (pembuat keputusan).³⁵ Penelitian ini memiliki tingkat analisis yang berada dalam tingkat negara bangsa karena peneliti menjelaskan kebijakan Italia yang bekerja sama dalam sebuah program pembangunan lintas negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yang tidak diolah atau dianalisis terlebih dahulu. Data primer yang akan peneliti gunakan adalah pernyataan resmi atau *press release* dari pemerintahan dan salinan atau transkrip dari pernyataan resmi pejabat negara atau pidato kenegaraan. Data primer akan penulis dapatkan dari situs resmi pemerintahan seperti situs *Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation* (<https://www.esteri.it/en/ministero/>), *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China* (<https://www.mfa.gov.cn/>), dan situs resmi Uni Eropa (https://european-union.europa.eu/index_en). Selain situs resmi, penulis juga mendapatkan data-data terkait kebijakan dan pernyataan resmi pemerintahan Italia dari media sosial

³⁴ Mochtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (LP3ES, 1990), 39.

³⁵ John Spanier, *Games Nation Play: Analyzing International Politics* (1981), dikutip dalam Mochtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (LP3ES, 1990), 45

seperti akun X (Twitter) *Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy* yaitu @ItalyMFA_int, delegasi permanen Italia untuk NATO di akun X @ItalyatNATO dan delegasi permanen Italia untuk Uni Eropa di akun X @ItalyinEU. Selain media sosial X, penulis juga mendapatkan data dari media sosial Instagram *Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy* yaitu @italymfa dan delegasi permanen Italia untuk Uni Eropa di akun @italyineu.

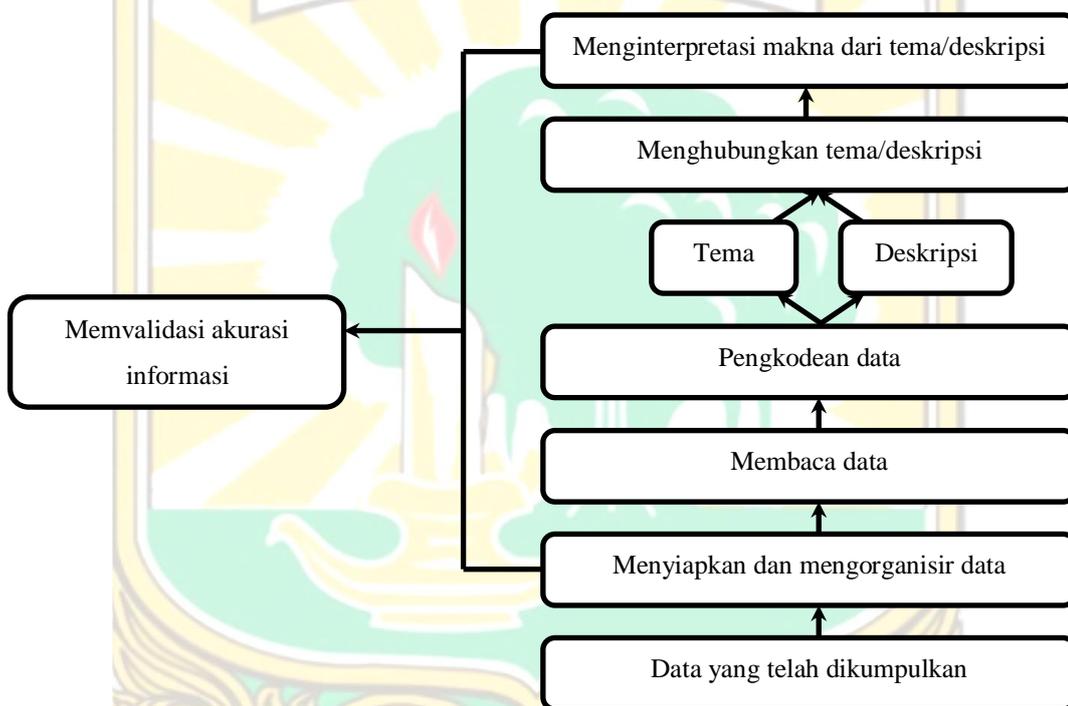
Sedangkan data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.³⁶ Data sekunder yang akan penulis gunakan didapatkan dari teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dari sumber literatur akademik atau ilmiah yang dapat berupa buku, artikel jurnal, majalah, situs resmi pemerintahan, dan lain-lain. Data sekunder berupa berita-berita terkait penelitian akan penulis dapatkan dari situs-situs resmi pemerintahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan situs-situs resmi kanal berita *online*. Untuk informasi mengenai kerja sama yang dilakukan dalam program BRI Tiongkok sendiri akan diperoleh dari situs resmi *Belt and Road Portal* (<https://eng.yidaiyilu.gov.cn/>) dan data tambahan dari *World Bank* (<https://www.worldbank.org/en/home>) serta OEC (*The Observatory of Economic Complexity*) (<https://oec.world/en>).

Sedangkan untuk kebutuhan penelitian, penulis mengumpulkan data sekunder dari sumber lainnya yaitu artikel jurnal, diantaranya yaitu “*Italy-China Relations and the Belt and Road Initiative. The Need For a Long Term Vision*”

³⁶ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua. (Medan, 2012), 107.

yang ditulis oleh Simone Dossi pada tahun 2020 yang memuat awal mula interaksi Italia dengan BRI Tiongkok serta pandangan Italia dan Tiongkok satu sama lain dalam kerja sama ini serta artikel jurnal “*Italy’s Embrace of the Belt and Road Initiative: Populist Foreign Policy and Political Marketing*” oleh Giula Pugliese et. al. pada tahun 2022 yang memuat keterkaitan faktor politik domestik Italia dengan proses penandatanganan MoU BRI Tiongkok oleh Italia.

1.8.5 Teknik Analisis Data



Gambar 1.3 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell dan Creswell, “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti membutuhkan tahapan dalam menganalisis data yang ada. Teknik analisis ini digunakan untuk memberikan makna pada data sehingga data yang ada dapat dimengerti. Terdapat 5 tahapan dalam proses analisis data:

1) Menyiapkan dan Mengorganisir Data

Sebelum diolah, data yang telah dikumpulkan harus disiapkan terlebih dahulu. Proses ini dapat berupa pengetikan transkrip wawancara, memindai dokumen, mengetik catatan lapangan, mengkategorikan data-data visual, mengkategorikan data berdasarkan sumber, dan masih banyak kegiatan lainnya.

2) Membaca Data

Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara umum dari informasi-informasi yang terkandung dalam data yang ada.

3) Pengkodean Data (*Coding*)

Pengkodean data adalah proses di mana data akan dikelompokkan dalam berbagai kategori berdasarkan bukti-bukti tertentu. Kategori-kategori ini kemudian akan diberi label yang menggambarkan kategori tersebut secara umum.

4) Menafsirkan Data

Proses pengkodean yang telah dilakukan sebelumnya akan memberikan deskripsi umum dari latar sumber data serta kategori atau tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi terkait dengan pengolahan detail dari informasi mengenai orang, tempat, atau kejadian dalam suatu latar. Sedangkan tema atau kategori akan muncul dalam proses pengkodean yang kemudian dapat dijadikan acuan penelitian. Tema dan deskripsi yang ada kemudian akan dihubungkan untuk menyusun analisis penelitian.

5) Penyajian Data

Tema atau deskripsi yang telah disusun sedemikian rupa kemudian akan digambarkan, biasanya dalam bentuk narasi untuk menjelaskan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II Program *Belt and Road Initiative* Tiongkok

Pada bagian ini akan digambarkan secara umum sejarah dan perkembangan program BRI Tiongkok.

Bab III Hubungan Italia dan Tiongkok

Dalam bab ini akan dijelaskan hubungan Italia dan Tiongkok, kemudian bagaimana hubungan tersebut hingga Italia mengambil keputusan untuk bekerja sama dalam BRI Tiongkok.

Bab IV Analisis Kebijakan Italia Bekerja Sama dalam BRI Tiongkok Tahun 2019-2023.

Bab ini membahas dan menganalisis mengapa Italia bekerja sama dalam program BRI Tiongkok tahun 2019-2023.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.